

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Tanubroto, S.1982, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 1.
- Moeljatno dalam Ruslan Renggong.2014, *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 71.
- Sudibyo Triatmojo.1982, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP*. Bandung: Alumni, hlm. 54.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 137.
- Muhammad Iqbal. Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 190-191.
- Ibrahim, Johnny, 2011. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 296.
- Bambang Poernomo, 1982. *Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 3.
- Suryono Sudarto, 1987. *Hukum Acara Pidana I*. Semarang: Yayasan Cendekia Puma Dharma, hlm. 5.
- R. Atang Ranoemihardjo, 1983. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Bandung: Tarsito, hlm. 11.
- Yahya Harahap, 2001. *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid 1)*. Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 54.
- A.Z. Abidin Frid, 1981. *Sejarah dan Perkembangan Asas Opportunitas di Indonesia*. Ujung Pandang: UNHAS, hlm. 12.
- Bambang Poernomo, 1985. *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 79.
- M. Yahya Harahap, 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2008. *Hukum Acara Pidana (Surat-surat resmi pengadilan dan advokat)*. Jakarta: Djambatan, hlm. 40.
- Andi Muhammad Sofyan et al., 2021. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 131.
- Rahman Amin, 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, hlm. 13.
- Hendra Soetarna, 2023. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 1.
- C.S.T. Kansil & Cristine S.T. Kansil, 1984. *Hukum Tata Negara RI Jilid I*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 191.
- Suharto, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 250.
- Martiman Prodjomidjojo, 1984. *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam*

Pemeriksaan. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 22.

Abdul Thalib, 2005. Teori dan Filsafat Hukum Modern dalam Perspektif. Pekanbaru: UIR Press, hlm. 168.

Skripsi/Tesis

Romadona, 2017. Analisis Praperadilan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tribuna Chitra Asa Nahdho Jaya Tanjung, 2019. Analisis Putusan Praperadilan terhadap Penetapan Status Tersangka Halim Susanto (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN SMG). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Mujiyono, Agus Sri, 2009. Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka dan Potensi Pelanggaran pada Penyidikan Perkara Pidana. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Jurnal

Abbon, Thomas. 2018. Penahanan dan Penangguhan Penahanan dalam Teori dan Praktik. Jurnal Hukum To-ra, Vol. 4 No. 1. Universitas Kristen Indonesia.

Hidayat, Maskur. 2015. Pembaharuan Hukum terhadap Lembaga Praperadilan melalui Putusan Pengadilan. Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 30 No. 3, hlm. 510.

Roberts K. 2019. Perluasan Kewenangan Praperadilan sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Jurnal Civitas, Fakultas Hukum Universitas Batam, Vol. 2 No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Tuntutan Ganti Kerugian.